KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Peringatan komisi VIII, kekerasan terhadap anak pelanggaran HAM serius
**Tanggal** : Rabu, 11 November 2026
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

Peringatan Komisi VIII

# Kekerasan Terhadap Anak Pelanggaran HAM Serius

ANGGOTA Komisi VIII DPR Surahman Hidayat menyoroti meninggalnya remaja perempuan berinisial LA (17) akibat tindak kekerasan yang terjadi di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).

Menurutnya, kasus ini mesti menjadi perhatian bersama agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan hingga kehilangan nyawanya. "Negara perlu memastikan keadilan ditegakkan dan peristiwa serupa tidak kembali terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya," tegas Surahman di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya, LA (17), remaja perempuan yang menjadi korban pembakaran oleh neneknya sendiri di kawasan Bojongsari, Depok, mengalami luka bakar hingga 80 persen pada Senin (26/10/2026). Korban sempat mengalami koma dan menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit sejak Jumat (30/10/2026). Sebelum akhirnya korban meninggal dunia pada Minggu (8/11/2026).

Surahman melanjutkan, kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak boleh ditoleransi. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan yang menghilangkan hak hidup seorang anak.

Ia mengecam tindakan kekerasan yang diduga dilakukan pelaku terhadap korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak. Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, termasuk ketika terjadi dalam lingkup keluarga.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. "Seharusnya keluarga menjadi benteng pertama perlindungan anak dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan," tegas politisi PKS ini.

Selain itu, ia menyoroti informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya riwayat kekerasan yang dialami korban dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan sejumlah warga sekitar yang beredar di media, korban disebut kerap mendapatkan perlakuan kasar sejak masih duduk di bangku SMP.

Dugaan tersebut antara lain menyebut korban pernah mengalami luka lebam hingga tindakan yang mempermalukan korban dengan mencukur habis rambutnya. "Informasi tersebut tentu perlu didalami dan diverifikasi secara


FOTO: DPR.GO.ID

Surahman Hidayat

menyeluruh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya," desak dia.

Apabila benar terdapat riwayat kekerasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, maka ini menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. "Tidak boleh ada anak yang mengalami kekerasan berulang tanpa terdeteksi dan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai," tegasnya.

Surahman meminta aparat penegak hukum mengusut peristiwa tersebut, juga menelusuri kemungkinan adanya pola kekerasan yang terjadi sebelumnya. "Pengungkapan rangkaian peristiwa secara utuh penting untuk memastikan keadilan bagi korban," tandas legislator asal Jabar ini.

Anggota Komisi XIII DPR Anisah Syakur menambahkan, peristiwa ini menjadi cermin masih lemahnya perlindungan anak, bahkan di lingkungan yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi mereka. Karena itu, kasus ini mesti menjadi momentum bagi Pemerintah dan DPR untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Salah satunya melalui percepatan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.

"Regulasi yang ada perlu diperkuat agar perlindungan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mampu mencegah kekerasan sejak dini," ujar Anisah di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, kasus ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap anak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Padahal, keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama yang memberikan perlindungan, rasa aman, dan kasih sayang kepada anak.

"Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita khawatir terhadap hilangnya rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan keluarganya sendiri," kata politisi PKB ini.

Dia bilang, negara dan masyarakat perlu memastikan setiap anak memiliki lingkungan yang aman, baik di dalam keluarga maupun di luar rumah. Jangan sampai anak justru mencari rasa aman di luar rumah karena tidak mendapatkannya dari keluarganya sendiri. "Pengawasan, edukasi keluarga, serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi kekerasan harus diperkuat," tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 426 kasus pengaduan terkait anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 kasus berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Data tersebut, lanjutnya, menunjukkan persoalan perlindungan anak membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh. Karena itu, revisi UU Perlindungan Anak perlu diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, memperjelas mekanisme perlindungan dan penanganan korban. Juga memastikan adanya pengawasan dan tanggung jawab yang lebih kuat dari seluruh pihak terkait. ■ TIF